**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Pada umumnya negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia dan kecuali Singapura sejak awal mengandalkan diri sebagai perekonomian yang lebih besar pasak daripada tiang artinya komsumsi bangsa-bangsa di Asia Tenggara lebih tinggi daripada produksinya. Memang tidak ada salahnya menggunakan modal asing dan meminjam dari luar negeri, namun sudah siapkah Indonesia menerima kenyataan kalau dana yang masuk itu adalah tujuan untuk keuntungan jangka pendek, sudah siapkah perekonomian Indonesia menerima konsekuensi, tidak dapat berbuat banyak mengendalikan lalu lintas modal luar negeri itu. Perlu di ingat bahwa arus modal masuk tersebut justru harus bisa dijadikan stimulan agar perekonomian lebih produktif, sehingga terbebas dari kondisi besar pasak dari pada tiang.[[1]](#footnote-2)

Gejolak nilai tukar rupiah sejak Juli 1997, sepatutnya kian membuka mata hati, terhadap berbagai persoalan mendasar yang pernah terjadi pada perekonomian Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya 16 Agustus 1997 yang mengatakan:

“Guncangan-guncangan yang melanda mata uang berbagai Negara di kawasan Asia Tenggara akhir-akhir ini adalah wujud nyata dari pengaruh negatif perekonomian dunia yang terbuka. Kita melihat bahwa kurs mata uang apa pun dapat berubah dengan cepat. Kenyataan ini tidak dapat dihindari oleh Negara manapun, oleh pelaku ekonomi manapun“[[2]](#footnote-3)

Krisis ini telah membuat tekanan pada masyarakat berkembang semakin kuat. Dalam kaitan ini, organisasi serta tokoh-tokoh politik kemudian dapat mengubah berbagai tuntutan dan kepentingan masyarakat menjadi tekanan untuk perubahan yang bersifat terpusat. Dengan kata lain, krisis telah menjadi hal penting bagi tuntutan perubahan Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang dibandingkan itu adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan, penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi secara rill.[[4]](#footnote-5)

Hampir semua propinsi yang ada di Indonesia merasakan dampak dari krisis ekonomi, dan salah satu propinsi yang terimbas dari krisis ekonomi adalah Sulawesi Selatan. Meski dapat dikatakan bahwa dampak dari krisis ini tidak terlalu memberi dampak besar terhadap Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh H. Fachrudin:

“Bahwa pada masa krisis ekonomi, wilayah sulawesi Selatan tidak begitu merasakan dampaknya dibandingkan dengan daerah-daerah lain, bahkan dikenal sebagai penghasil komoditas ekspor seperti coklat, kopi, vanili, jambu mente, udang, dan ikan”.[[5]](#footnote-6)

Sejak tahun 1994 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar. Jika dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1996 yang tumbuh masing-masing tercatat sebesar 8,28% dan 8,31%. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 1997 yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 1993 mengalami perkembangan yang sangat lambat, yaitu 4,30%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 1997 akibat rendahnya pertumbuhan sektor pertanian yang mempunyai andil terbesar pada perkonomian Sulawesi Selatan. Sektor pertanian dengan andil sebesar 34,66% terhadap total perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar 0,57%. Pada periode pelita IV pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan agak melambat dengan rata-rata hanya 6,41%. Pada pelita V laju pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat dengan rata-rata 7,64% pertahun. Namun pada 4 tahun terakhir pertumbuhan itu sedikit melemah dengan rata-rata 7,14% pertahun[[6]](#footnote-7).

Gerak laju pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 1997 menurun cukup drastis dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, dampak dari kemarau panjang yang melanda seluruh wilayah Indonesia dan hal ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan sektor pertanian.[[7]](#footnote-8)

Ada empat komoditas yang terus dipegagang teguh pada saat Zainal Basri Palaguna masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yakni pada Bidang Pertanian yakni Padi, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan. Dari keempat komoditas andalan Sulawesi Selatan ini, padi merupakan aspek utama dalam pemasukan daerah, karena sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan merupakan seorang petani sawah yang ditanami padi.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 1997 sebesar 4,30%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 1996 yang mencapai angka 8,31%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian yang negatif. Selama ini sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Sulawesi Selatan yang andilnya tiap tahun rata-rata berkisar pada angka 34,66%. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dan juga penggalian juga tumbuh negatif atau turun 6,89%. Sementara itu tahun sebelumnya tumbuh cukup tinggi sebesar 12%.[[8]](#footnote-9)

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian Sulawesi Selatan terutama tanaman pangan. Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen pangan yang cukup potensial ditambah sektor pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kedele, memiliki daya saing yang cukup tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Namun produksi pertanian selama beberapa tahun terakhir mengalami beberapa kendala yang dihadapi seperti rendahnya kualitas pada sebagian produk yang dihasilkan sehingga sulit untuk dipasarkan Dalam hal ini pertanian yang dimaksud adalah pertanian yang mengarah pada sektor pangan yakni beras.

Pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dibangun oleh mayoritas usaha yang berskala kecil dan menengah ini ditandai dengan melihat keadaan sosial di Sulawesi Selatan bahwa rata-rata petani itu berada dalam strata menengah kebawah maka pemerintah bertumpu pada ekonomi kerakyatan terutama pada sektor pertanian. Keterkaitan ini didasari atas beberapa komoditas produk unggulan pertanian daerah ini memiliki pengaruh sebagai penggerak pembangunan ekonomi wilayah.[[9]](#footnote-10)

Produksi produk pertanian pada dasarnya telah mengalami peningkatan yang cukup berarti selama 5 tahun terakhir, namun penanganan menyangkut kualitas produk yang relatif bervariasi dan sebagian masih rendahnya kualitas sehingga sering mengalami kendala untuk diterima oleh pasar, pemanfaatan faktor-faktor produksi utamanya pada tenaga kerja dan agroinput pada umunya belum efisien serta berbagai konstrain lainnya seperti kepemilikan lahan yang cenderung semakin sempit dan kualitas benih dan bibit yang tidak dapat menjamin pencapaian sasaran produksi sesuai yang diharapkan.[[10]](#footnote-11)

Strategi Gubernur Zainal Basri Palaguna yang menggantikan pendahulunya, Ahmad Amiruddin, melihat Sulawesi Selatan sebagai daerah pertanian dengan beragam komoditasnya. Apalagi pendahulunya sudah menetapkan itu sebagai strategi dasar mengembangkan daerah Sulawesi Selatan yang berbasis pertanian.[[11]](#footnote-12)

Seperti yang di katakana oleh Fachruddin bahwa:

“Selama tujuh tahun Palaguna menjadi gubernur, saya melihat dia tetap konsisten mengembangkan strategi tersebut. Karena itu, pada masa krisis ekonomi, wilayah Sulawesi Selatan tidak begitu merasakan dampaknya dibandingkan daerah-daerah lain bahkan dikenal sebagai penghasil ekspor seperti coklat, kopi, vanili, jambu mente, udang, ikan dan sebagainya. Dimasa kepemimpinan Palaguna, dia mengembangkan ini lebih lanjut dengan konsep Grateks-2. Artinya, gerakan petik olah jual ini akan dia gerakkan dalam bentuk massal dengan kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah”.[[12]](#footnote-13)

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji perekonomian di Sulawesi Selatan pada tahun 1998-2003 yaitu dengan melihat keadaan perekonomian nasional Indonesia dan bahkan dunia yang mengalami krisis tapi dibalik itu semua Sulawesi Selatan mampu meminimalisir pengaruh dari krisis ekonomi tersebut dan bahkan pada saat yang bersamaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan mengubah krisis ekonomi menjadi sebuah peluang untuk memajukan perekonomian rakyat Sulawesi Selatan dengan berpegang teguh pada sektor-sektor unggulan Sulawesi Selatan baik dibidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.

Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Zainal Basri Palaguna memiliki peran penting dalam mengatasi krisis ekonomi karena ini semua tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Zainal Basri Palaguna yang mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

1. **Rumusan Masalah**

Zainal Basri Palaguna merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang memiliki peranan penting dalam meminimalisir dampak dari krisis ekonomi dan mampu menstabilkan perekonomian Sulawesi Selatan maka dari itu masalah yang akan di teliti yakni:

1. Bagaimana kondisi perekonomian Sulawesi Selatan sebelum krisis ekonomi tahun 1988-1996?
2. Bagaimana dampak krisis ekonomi terhadap keadaan perekonomian Sulawesi Selatan saat pemerintahan Zainal Basri Palaguna?
3. Bagaimana kebijakan yang ditempuh Zainal Basri Palaguna untuk mengatasi krisis ekonomi?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan perekonomian Sulawesi Selatan sebelum krisis ekonomi.
2. Untuk mengetahui dampak krisis terhadap perekonomian Sulawesi Selatan saat Pemerintahan Zainal Basri Palaguna.
3. Untuk mengetahui kebijakan yang di tempuh oleh Zainal Basri Palaguna dalam mengatasi krisis yang terjadi di Sulawesi Selatan.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan refrensi dan memperluas pengetahuan tentang perekonomian Sulawesi Selatan khususnya pada masa pemerintahan Zainal Basri Palaguna.
2. Sebagai tambahan literatur bagi mereka yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai sejarah perekonomian Sulawesi Selatan.
3. Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem perekonomian pada era reformasi di Sulawesi Selatan.
4. **Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan pernyataan permasalahan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada Pemerintahan Zainal Basri Palaguna saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada priode keduanya yakni pada tahun 1998 sampai tahun 2003. Pembahasan ini secara tematis dimulai dari bagaimana keadaan perekonomian di Sulawesi Selatan pada masa krisis ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Zainal Basri Palaguna untuk mengatasi krisis ekonomi dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah kebijakan-kebijakan itu berjalan.

Batasan Spasial dan temporal dari penulisan ini adalah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1998-2003. Kurun waktu yang relatif pendek tersebut akan menggambarkan masa pemerintahan pada priode keduanya. Tahun 1998-2003 penulis ambil sebagai batasan temporal dalam tulisan ini karena berdasarkan pertimbangan pada tahun 1998 adalah tahun dimana Zainal Basri Palaguna diangkat untuk kedua kalinya menjadi Gubernur dan pada tahun tersebut adalah tahun terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dan tahun 2003 adalah akhir masa jabatan dari Gubernur Zainal Basri Palaguna. Penulis kemudian ingin menggali bagaimana perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun-tahun krisis ekonomi, serta bagaimana Zainal Basri Palaguna mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi khususnya di Sulawesi Selatan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa buku yang membahas tentang Kepemimpinan seorang Gubernur Zainal Basri Palaguna. Seperti yang diungkap oleh Majid Dkk dalam karyanya yang berjudul Sulawesi Selatan Dari Andi Pengerang Pettarani sampai H.Z.B. Palaguna dimana karya ini menjelaskan tentang gubernur Sulawesi Selatan secara umum dengan menjelaskan keadaan pemerintahan pada masa jabatan mulai pada A. Pangerang Pettarani sampai pada Zainal Basri Palaguna.[[13]](#footnote-14)

Adapula buku yang berjudul Perjuangan Membangun Indonesia Timur yang ditulis oleh Baramuli dan Laode M Kamaluddin yang dalam pembahasan buku ini menjelaskan tentang pembangunan, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia Bagian Timur yang di Nahkodai oleh Gubernur-Gubernur yang berasal dari Indonesi Timur seperti Zainal Basri Palaguna Dari Sulawesi Selatan, Harun Al Rasyid Dari NTB, Piet Tallo dari NTT, dan Gubernur-Gubernur lainya dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan Propinsi lainya yang berada di kawasan Indonesi bagian timur[[14]](#footnote-15).

Selain itu karya yang berjudul Kepemimpinan H.Z.B. Palaguna Membawa Sulawesi Selatan Memasuki Era Globalisasi yang disusun oleh Nurkomarudin dkk merupakan buku yang berisi tentang komentar-komentar dari pengamat politik tentang bagaiamana kepemimpinan Zainal Basri Palaguna mebawa Sulawesi Selatan memasuki Era Globalisasi.[[15]](#footnote-16)

Dari gambaran tersebut membuat penulis untuk mecoba memaparkan tentang keadaan perekonomian Sulawesi Selatan masa pemerintahan Zainal Basri Palaguna pada tahun 1998-2003 yang merupakan priode ke-2 memimpin Sulawesi Selatan, dengan melihat kebijakan-kebijakan yang diambil serta pengaruhnya terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Selain sebagai acuan karya-karya tersebut di atas kemudian penulis mencoba melihat spesifikasi keadaan perekonomian Sulawesi Selatan terutama pada masa pemerintahan Zainal Basri Palaguna. Karena dari literatur acuan yang penulis dapatkan belum ada yang menjelaskan secara detail mengenai bagaimana kebijakan Zainal Basri Palaguna mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan serta yang membahas tentang bagaimana dampak dari krisis ekonomi di Sulawesi Selatan.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitianini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini menyangkut tentang keadaan politik dan ekonomi masayarakat Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan prilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif dan holisitik.

1. **Sumber Data**

Pengenalan awal objek penelitian ini dilakukan dengan cara study kepustakaan. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut lingkup bahasan penelitian juga menganalisis beberapa bahan pustaka sehingga diperoleh gambaran khasanah yang tersedia. Dengan cara itu ruang kajian ini diposisikan didalam ataupun diluar ruang kajian terdahulu. Pemahaman konseptual mengenai subjek kajian membawa calon penulis lebih lanjut melakukan penulusuran sumber-sumber dokumen yang relevan dengan kajian ini. Penulusuran bahan pustaka akan dilakukan pada Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Multimedia Makassar, dan Perpustakaan Balai Kajian Makassar.

Pengungkapan sumber sejarah utamanya dari sumber lisan atau wawancara yang akan direkam menggunakan alat perekam. Perekaman terhadap informasi yang dituturkan para pelaku sejarah dan masyarakat yang mengetahui akan peristiwa tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan etika sejarah lisan. Bila pelaku yang diwawacarai tidak menginginkan jika informasi yang disampaikan direkam maka kegiatan perekaman tidak akan dilakukan. Wawancara dilakukan secara bebas dalam bentuk perbincangan biasa, namun peneliti tetap memperhatikan pokok informasi yang diperlukan dalam study penelitian ini. Sumber sejarah dikumpulkan diverifikasi sehingga diperoleh informasi yang akurat untuk digunakan dalam penulisan hasil penelitian nantinya. Selanjutnya, informasi tersebut akan dianalisa. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap pelaku utama yang masih hidup ataupun dengan melakukan metode tradisi lisan dan wawancara terhadap masyarakat yang memiliki informasi penting tentang *Kebijakan Zainal Basri Palaguna Mengatasi Krisis Ekonomi Di Sulawesi Selatan.*

1. **Teknik Penyajian Data**

Penggunaan metode dalam suatu penulisan ilmiah adalah suatu keharusan, tergantung dari tujuan penulisan sifat masalah yang digarap, dan berbagai alternatif yang digunakan. Sebagai sebuah karya ilmiah yang kerangka penulisannya yang mengacu pada aturan-aturan yang didasarkan pada obyek kajian dan latar belakang keilmuan, yang dalam hal ini adalah kajian sejarah, mengingat struktur dan metodologi penulisan sejarah yang sesungguhnya tidak lepas dari kelemahan yang tentunya sangat mempengaruhi, baik obyektifitas penulisan maupun orisinilitas penulisan. Meskipun demikian untuk tetap mengedepankan keilmiahan, maka penulis merujuk kepada beberapa referensi sebagai acuan untuk menetapkan metodologi penulisan yang lebih mendekati obyek kajian. Sebagai penelitian sejarah, maka metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian sejarah.

Secara umum penerapan metode penulisan sejarah yang mengacu pada prosedur penelitian sejarah menuntut kejelian dan kemampuan untuk mengkoloborasikan beberapa kerangka metode yang telah dipakai oleh penulis sebelumya. Dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempergunakan salah satu dari empat tahap penelitian sejarah yaitu heuristik atau kegiatan yang menghimpun jejak-jejak masalalu.

“Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan suatu cara atau tehnik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau melalui empat tahap sebagai berikut:

1. Heuristik, yakni kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik, yakni menyelidiki apakah jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya.
3. Interprestasi, yakni menetapkan makna.
4. Historiografi, yakni penulisan sajarah”.[[16]](#footnote-17)
5. **Heuristik**

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahap awal pada metode historis yang diarahkan pada kegiatan penjajakan, pencarian serta pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Carrard sebagai langkah awal ialah apa yang dimaksud Heuristik *(heuristics)* atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau mencari materi sejarah, atau evidensi sejarah.[[17]](#footnote-18) Heuristik atau pengumpulan data merupakan tahap awal metode historis dan diarahkan pada kegiatan penjajakan, pencarian serta pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah perekonomian Sulawesi Selatan khususnya pada masa pemerintahan Zainal basri Palaguna tahun1998-2003. Kegiatan heuristik pada penulisan ini menitik beratkan pada suatu kajian pustaka. Hal ini dimaksudkan agar pencarian serta pengumpulan sumber sejarah berupa dokumen-dokumen, arsip, buku literatur, maupun informasi langsung dari informan dapat lebih banyak dan mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1. **Kritik sumber**

Pada tahapan ini, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik, dilakukan penyaringan atau penyeleksian tentunya dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinilitasnya terjamin. Kritik sebagai tahapan yang juga penting terbagi menjadi dua, yakni internd dan eksternd.

“Setiap sumber mempunyai aspek internd dan aspek eksternd. Aspek eksterndnya bersangkutan dengan persoalan apakah sumber itu memang sumber, artinya sumber sejati yang dibutuhkan. Aspek interndnya bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan. Karena itu penulisan sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi eksternd dan interndnya”.[[18]](#footnote-19)

1. **Kritik eksternd**

Kritik eksternd dilakukan tidak hanya dalam bentuk dokuman sejarah, atau catatan pribadi, tetapi juga pada hasil wawancara. Kritik eksternd dalam konteks ini yakni mengkritisi aspek eksternal dari informan atau pelaku sejarah. Mereka yang diwawancarai adalah merasakan atau pada saat peristiwa terjadi minimal telah berusia 15 tahun, sehingga dapat mengerti dan memahami jiwa zaman ketika itu.

1. **Kritik Internd**

Kritik internd atau kritik dalam dilakukan untuk meneliti sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian dan penulisan skripsi ini. Tahapan ini menjadi ukuran sejauh mana obyektivitas penulis dalam mengkolaborasi segenap data atau sumber yang telah diperolehnya, dengan tentunya mengedepankan prioritas.[[19]](#footnote-20)

Pada tahapan ini sesungguhnya kita dapat mengukur keabsahan suatu sumber, yang kemudian akan dikomparasikan dengan sumber yang satu dengan yang lainnya yang tentunya dengan masalah yang sama. Kritik internd dilakukan dalam hasil wawancara adalah menelaah secara kritis informasi yang diberikan. Kemudian penulis mengkomparasikan dengan sumber pengujian sumber-sumber lain, apakah terdapat kesesuaian atau sebaliknya.

Hasil dari kritik sejarah tersebut, baik kritik eksternd maupun internd akan diharapkan pada data yang akurat, kredibel yang kemudian disebut dengan fakta sejarah. Setelah mendapatkan data yang akurat, melalui tahapan kritik eksternd dan kritik internd, maka selanjutnya diadakan interprestasi terhadap fakta sejarah tersebut.

1. **Interpretasi**

Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interprestasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan terhadap fakta tersebut yang subjektif. Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integrasi seorang peulis untuk menghindari interprestasi yang subyektif terhadap fakta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.[[20]](#footnote-21)

1. **Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Kajian ini adalah merupakan tahap akhir atau puncak dari seluruh rangkaian dari proses penulisan. Setelah melalui heuristik, kritik internd dan ekstren, pada tahap ini dilakukan rekontruksi sejarah sesuai subyek penelitian. Analisa yang diperoleh sebelum disusun secara sistematis sebagai suatu kisah.

Dalam penyajian ini dipakai pendekatan deskriptif historis artinya usaha dan memaparkan fakta sejarah dari suatu peristiwa berdasarkan kausalitasnya secara kronologis, yakni tahap penulisan dan penyajian seperti yang dikemukakan oleh Saleh Madjid dan Rahman Hamid bahwa :

“Dalam konteks ini, penulisan sejarah tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif mengenai: “apa”, “siapa”, ”kapan”, dan “bagaimana”, suatu peristiwa terjadi (disebut histori evenementielle atau sejarah prosesual menurut Sartono Kartodirdjo), melainkan suatu eksplanasi secara kritis dan mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” atau sebab musabab terjadinya suatu peristiwa”. [[21]](#footnote-22)

Berdasarkan penulisan sejarah itu pula, akan didapat nilai apakah penelitian ini berlangsung sesuai dengan prosedur yang digunakan atau tidak, apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulan memiliki validasi atau kredibilitas yang memadai atau tidak dan sebagainya. Sehingga penulisan tersebut dapat dikatakan menentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri. Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah dirumuskan atau diinterpretasikan itu selanjutnya dirangkaikan untuk mengungkapkan kisah sejarah yang menjadi topik dalam penulisan sejarah ini secara kronologis dan penjelasan makna.

1. Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2002), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hlm.15. [↑](#footnote-ref-3)
3. Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Irian Jaya:MedPres,2007). hlm. 40. [↑](#footnote-ref-4)
4. Anonim, *Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan 1994-1997*, (Makassar:BPS 1998). hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurkomarudin,dkk, *Kepemimpinan H.Z.B Palaguna Membawa Sulawesi Selatan Memasuki Era Globalisasi*, (Makassar:Lentera21, 2000), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Op. Cit,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Anonim, *Laporan Perekonomian Sulawesi Selatan 1997*, (Makassar:BPS1998), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
9. Anonim, *H.Z.B Palaguna Menerobos Ekspan, Menggapai Harapan,* (Makassar:Biro Humas dan Protokol Propinsi Sulawesi Selatan 2008), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Nurkomarudin,dkk, *Kepemimpinan H.Z.B Palaguna Membawa Sulawesi Selatan Memasuki Era Globalisasi*, (Makassar:Lentera21, 2000), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* hlm. 30. [↑](#footnote-ref-13)
13. Madjid dkk, *Sulawesi Selatan Dari Andi Pangerang Pettarani sampai H.Z.B Palaguna,* (Makassar:Lembaga Kajian Indonesia1999) [↑](#footnote-ref-14)
14. Laode M Kamaluddin, *Perjuangan Membangun Indonesia Timur,* (Jakarta:Yapensi 2001) [↑](#footnote-ref-15)
15. Nurkomaruddin, dkk, *Kepemimpinan H.Z.B Palaguna Membawa Sulawesi Selatan Memasuki Era Globalisasi,* (Makassar:Lentera 2000) [↑](#footnote-ref-16)
16. Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah,* (Yogyakarta: Ombak, 2007 ), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* hlm. 94. [↑](#footnote-ref-21)
21. M.Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Makassar: Rayhan Intermedia. 2008), hlm. 59. [↑](#footnote-ref-22)